KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 1 4			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Н.5	Tidak Final	
A IDENITITAG DENERUMA DENGUAGUAN YANG DIDOTONG							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 8 5 2 6 4 8 1 9 5 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RADEN RORO RANI MEITA PRATIWI SUBAGYONO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	В.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01	6.810.000	6.810.000	0	5	340.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C IDENTITAS DEMOTONO DA IAK							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : [9 5] [3 3 5 [0 1 6 2 [7 2 2 [0 0 0]] C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						I TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal .		0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penar	idatangan :	RIANDY					
C.6 Pernyataan	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							

HU5AKA50